

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan yang memprioritaskan kemiskinan telah dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun keberhasilan program tersebut belum optimal karena adanya hambatan dari faktor lain yang berada diluar proses perencanaan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan perencanaan pembangunan dibawah ini.

##### **a. Prioritas**

Proses penetapan prioritas pembangunan dalam RPJMD melibatkan berbagai pihak melalui tahapan yang terstruktur. Dimulai dengan pengumpulan usulan masyarakat melalui Musrenbang, yang kemudian dianalisis untuk menentukan program strategis dan mendesak, serta disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan daerah. Forum OPD digunakan untuk harmonisasi antar sektor, memastikan setiap program selaras dengan kebijakan dan anggaran yang tersedia. DPRD turut berperan dalam memberikan persetujuan dan pengawasan terhadap prioritas yang ditetapkan. Keterlibatan masyarakat, perangkat desa, kecamatan, Bappelitbangda, OPD, dan pemangku kepentingan lainnya, seperti LSM dan sektor swasta, memastikan bahwa prioritas pembangunan

yang dihasilkan relevan, realistis, dan dapat diimplementasikan dengan efektif. Prioritas pembangunan difokuskan pada pengentasan kemiskinan melalui strategi pengurangan beban masyarakat, peningkatan pendapatan, dan penghapusan kantong kemiskinan. Dengan prioritas perencanaan yang baik maka terjadi penurunan angka kemiskinan di Purbalingga, bahkan menjadi penurunan kemiskinan terbaik di Jawa Tengah. Namun, tantangan seperti starting point yang tinggi, validitas data, keterbatasan anggaran, dan kurangnya pemahaman kebutuhan masyarakat masih perlu diatasi. Monev dilakukan secara rutin melalui rapat TPKPD dan evaluasi triwulan untuk memastikan efektivitas kegiatan.

#### b. Partisipasi Masyarakat

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Purbalingga melibatkan masyarakat secara aktif melalui mekanisme musrenbang di berbagai tingkat, mulai dari desa hingga kabupaten, untuk menyerap aspirasi, masukan, dan kebutuhan lokal. Proses ini memastikan bahwa program pembangunan yang dirumuskan lebih relevan dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang bervariasi, dengan beberapa desa menunjukkan keaktifan yang tinggi, sementara di beberapa tempat, kontribusi peserta masih terbatas. Selain peran masyarakat, pihak swasta juga memiliki kontribusi penting melalui program CSR mereka, baik dalam bentuk dana maupun masukan strategis terkait

pembangunan daerah. Namun, pengelolaan CSR di Purbalingga menghadapi kendala akibat kurangnya pendataan yang komprehensif, sehingga koordinasi antara pemerintah dan perusahaan menjadi kurang optimal. Hal ini menunjukkan perlunya sistem pendataan dan pengelolaan yang lebih baik untuk memastikan CSR dapat mendukung prioritas pembangunan daerah secara maksimal dan terarah.

## 5.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan mengenai penetapan prioritas dan partisipasi masyarakat menggunakan teori Jhingan (1984) pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga, implikasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

### a. Prioritas

Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada evaluasi capaian sebelumnya, penentuan isu strategis, dan penyusunan program berbasis data. Meski pendekatan ini telah membawa penurunan angka kemiskinan terbaik di Jawa Tengah, tantangan seperti keterbatasan anggaran, intervensi politik, dan data yang kurang valid tetap menjadi hambatan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat integrasi antara kebijakan, strategi, dan kebutuhan masyarakat melalui peningkatan validitas data, optimalisasi sumber daya, serta pelibatan aktif masyarakat dan OPD. Dengan langkah ini,

prioritas pembangunan dapat lebih berdampak signifikan pada pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat dalam musrenbang perlu terus didorong dan difasilitasi melalui edukasi serta pendekatan yang lebih inklusif, agar masukan yang diberikan semakin berkualitas dan mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Kedua, kolaborasi dengan pihak swasta melalui program CSR harus dioptimalkan dengan membangun sistem pendataan yang komprehensif dan terintegrasi. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memetakan program CSR secara jelas, memastikan kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan daerah, serta meningkatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta.

